



Universitas Al Azhar Indonesia

PUBLIC SPHERE DAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Karya Ilmiah



Oleh:

Muchammad Nasucha, SS, M.Si.

*Karya ini adalah karya pribadi.
Yang disusun sesuai dengan etika penulisan ilmiah
Penulis bertanggungjawab atas seluruh isinya*

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA

Agustus 2010

Perpustakaan
Universitas Al Azhar Indonesia
IL 302.2
Muc
p
C1

| | | |
|----------------|---|-------------------|
| No. Induk | : | C1 364/12 |
| Klasifikasi | : | IL 302.2 Muc p |
| Subyek | : | |
| Katalog | : | |
| Harga/Asal | : | |
| Pemb./Had./Tk. | : | Hadiah |
| Dil. | : | 4/1 2013 |





Universitas Al Azhar Indonesia

PUBLIC SPHERE DAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Karya Ilmiah



Oleh:

Muchammad Nasucha, SS, M.Si.

*Karya ini adalah karya pribadi.
Yang disusun sesuai dengan etika penulisan ilmiah
Penulis bertanggungjawab atas seluruh isinya*

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA

Agustus 2010

| | | |
|----------------|---------------------|---|
| No. Induk | : C1 364/12 |  Universitas Al Azhar Indonesia |
| Klasifikasi | : IL 302.2 Muc p | |
| Subyek | : | |
| Katalog | : | |
| Harga/Asal | : | |
| Pemb./Had./Tk. | : Hadiah | |
| Dil. | : 41 2013 | |

PUBLIC SPHERE DAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Oleh

Muchammad Nasucha, SS, M.Si

I. LATARBELAKANG

Demokrasi Indonesia (red-kita) berjalan pasang-surut dengan berbagai dinamikanya. Pergantian sistem pemerintahan dan perpolitikan di tanah air tidak lepas dari berbagai faktor mulai dari hubungan sistem internal (Indonesia) dengan sistem luarnya (Negara-negara di dunia) hingga pergantian para pelakunya yang merupakan suatu siklus berkelanjutan yang alami atau faktor-faktor penting lainnya. Percepatan perubahan yang terjadi ini harus diakui terutama karena faktor relasi antar para agen perubahan di tanah air dengan jaringan internasional dengan dukungan penemuan dan pengembangan teknologi komunikasi dan informasi termasuk relasi melalui pendidikan, ekonomi dan bidang-bidang lainnya. Dengan kata lain secara sederhana dapat kita pahami bahwa perubahan dan dinamika yang telah, sedang dan akan kita alami berkaitan dengan multi-faktor (*human factor* dan *nonhuman factor*) interdeterminan, dimana antara satu faktor dengan faktor lainnya saling menentukan dan saling berinteraksi.

Pasca penemuan teknologi cetak di tahun 1450an, tepatnya 1455 (lihat Griffin, 2003: 342-343; Nurudin, 2007: 55-56; Vivian, 2008: 40-41; Straubhaar & LaRose, 2004: 18 & 65) terjadi banyak perubahan komunikasi dan informasi manusia. Dan hal ini jelas berimplikasi secara langsung kepada budaya komunikasi manusia. Keniscayaan komunikasi dan informasi massal yang dipercaya McQuail (2000) telah ada sejak manusia zaman dahulu, bisa digambarkan dengan jejak sejarah hubungan para nabi dengan umatnya serta para pemimpin suatu bangsa dengan rakyat mereka sebagai suatu gambaran konkretnya, dan ini adalah sesuatu yang nyata, lahir, hadir dan berkembang menjadi suatu fenomena riil bagi kehidupan manusia hingga sekarang ini. Meskipun demikian, keterbatasan jangkauan informasi massal juga belum secara sempurna terwujud hanya dengan temuan Guttenberg tersebut, keniscayaan komunikasi massa yang menghapus rintangan ruang dan waktu (*borderless: timeless and spaceless*) menjadi lebih memungkinkan setelah ditemukannya telegraf pada 1850. Kemampuan mesin cetak hanya terbatas pada dokumentasi pesan komunikasi dan informasi dalam jumlah besar (pesan komunikasi massa) dan belum berhasil mengatasi rintangan ruang, dalam masalah transmisi pesan dalam waktu yang relatif singkat dari satu tempat ke tempat lainnya yang berjauhan, yang akhirnya dapat diatasi oleh kemampuan telegraf. Dan penemuan teknologi internet menyempurnakan komunikasi tanpa batas, termasuk komunikasi level massal.

Penemuan teknologi internet yang mengambil dasar dari pengembangan sistem komputer dan jaringan telepon juga satelit yang hingga sekarang marak digunakan dalam berbagai konteks komunikasi, dari komunikasi interpersonal, kelompok hingga komunikasi massa, harus diakui telah menjadi suatu alat komunikasi penting bagi kita sekarang ini. Hal tersebut jelas merupakan suatu bukti lainnya yang menguatkan asumsi bahwa teknologi mengatasi rintangan hubungan ruang dan waktu, dan prediksi McLuhan beberapa dekade lalu menjadi suatu realitas bagi kita sekarang, bahwa sekarang kita hidup dalam suatu desa global (*global village*) dimana tidak ada lagi rintangan yang signifikan dari ruang dan waktu untuk saling berkomunikasi. Manusia di Indonesia, bisa dengan mudah berkomunikasi dengan manusia di Alaska dan

tempat lainnya yang berjauhan hanya dengan menggunakan teknologi internet. Riset Connaughton dan Daly (2005: 187–206) memberikan gambaran pengaruh internet, teknologi komputer berjaringan, dalam kehidupan korporasi yang lintas waktu, ruang dan geografis, dimana seorang pemimpin tidak perlu lagi berada dalam satu tempat dan geografis dengan bawahannya untuk mengarahkan, mengontrol dan menjalankan suatu usaha korporasi.

Perkembangan belakangan ini (teknologi komputer: internet) juga jelas telah mengubah budaya komunikasi dan informasi manusia di desa global kita ini, dan menyamarkan batasan antara komunikasi publik dan privat yang telah juga disinggung oleh McQuail (2000/2002) dan para futuristik lainnya, bahwa selain terhapusnya batasan-batasan ruang komunikasi karena teknologi yang ada juga telah membawa permasalahan baru bagi manusia (kita). Masalah kita sekarang ini tidak lagi berhenti di pembicaraan internet sebagai suatu media baru (*internet as a new media*), karena yang awalnya internet hanya dapat diakses dengan PC (*Personal Computer*) yang berbasis di kantor-kantor dan rumah-rumah, kini internet dapat digenggam oleh setiap individu dengan invensi telepon genggam dengan fitur-fitur internet di dalamnya. Dengan kata lain dunia global sekarang ini telah ada dalam genggamannya individu-individu pelaku komunikasi (*global world in individual's hand*), ini jelas menimbulkan serta menumbuhkan suatu budaya baru bagi manusia dalam berkomunikasi.

Budaya komunikasi bangsa kita yang tadinya dapat dibedakan dengan berbagai tingkatan, pengelompokan dan kategori, kiranya sekarang perlu dilakukan pemetaan ulang, meskipun tidak sangat fundamental, dikarenakan implikasi langsung teknologi komputer dalam genggamannya tiap individu. Berbagai tatanan sosial, pendidikan, ekonomi, politik dan lainnya bagi manusia telah dan sedang mengalami banyak pergeseran yang sangat signifikan. Sebagai contoh, telepon genggam atau *handphone* (selanjutnya disingkat hp) dahulunya, sekitar tahun 1990an akhir di masyarakat kita merupakan teknologi eksklusif yang hanya dimiliki oleh masyarakat kelas menengah atas (bahkan awalnya didominasi oleh kelas atas: orang-orang berkemampuan ekonomi sangat cukup). Namun berjalannya kompetisi persaingan global dalam bidang ekonomi membawa perubahan pasar, sekarang ini bisa kita temukan hampir semua individu mulai dari manajer top perusahaan swasta, eksekutif muda, pelaku bisnis, pejabat Negara, pegawai kantoran, pedagang kaki lima, tukang becak, gelandangan dan pengemis memiliki hp.

Budaya komunikasi bangsa dan masyarakat kita berubah secara drastis menjadi komunikasi berbasis fitur hp (*mini computer portable*), dan para penggunanya minimal “harus” berkemampuan komunikasi lisan. Tuntutan yang dibawa teknologi hp ini jelas kemudian mengubah berbagai pola komunikasi bangsa ini dari komunikasi lisan yang beragam menuju komunikasi lisan yang aktif (*active oral communication*) dan budaya baca pesan-pesan singkat (*sms-reading culture*), bahkan sekarang juga ada *bbm-reading culture*. Fitur hp juga memungkinkan penggunanya mengakses internet kapanpun dan dimanapun. Apalagi beberapa provider telepon selular menyediakan tarif murah dan promosi bagi pengguna hp untuk bisa mengakses internet: *browsing, chatting* ataupun lainnya berbasis jaringan komputer. Data statistik memperlihatkan bahwa pengguna internet di dunia termasuk di Indonesia terus mengalami peningkatan dari hanya 0,4% pada 1998 menjadi 23,3% menurut situs *internetworld.com*, termasuk di dalamnya jejaring sosial seperti twitter, facebook

(yang menurut statistik mencapai 500 juta pengguna) dan lainnya. Menurut data statistik yang dirilis facebook setiap harinya hampir sekitar 50% dari penggunanya login dan menghabiskan waktu mereka. Ini dapat kita artikan bahwa masyarakat dunia, termasuk Indonesia mengalami suatu pola komunikasi bermedia, khususnya yang berbasis komputer (hp). Antaranews.com melaporkan hingga Juni 2010 pengguna hp di Indonesia mencapai 180 juta pelanggan atau sekitar 80% dari total penduduk saat itu (<http://www.antaranews.com/berita/1279093421/pengguna-ponsel-indonesia>). Adapun pengguna hp menurut data statistik sensus nasional pada tahun 2006 di Jakarta saja mendapatkan data yang meningkat dibandingkan tahun 2005, yaitu mengalami kenaikan sebesar 10% dari 50% menjadi 60% dari total penduduk Jakarta memiliki hp (<file:///C:/Documents%20and%20Settings/Nasucha/My%20Documents/Kajian%20Pengguna%20Handphone%20di%20DKI%20Jakarta%20%20Statistik%20Susen.htm>). Dari data ini dapat kita asumsikan bahwa kemungkinan besar atau sekitar 60% pada tahun 2006 penduduk Jakarta berkomunikasi dengan menggunakan hp, baik untuk kebutuhan komunikasi berskup individu atau interpersonal, antar kelompok hingga komunikasi dalam dunia maya yang lintas batas daerah dan Negara. Teknologi hp jelas dengan begitu memiliki posisi sentral bagi kehidupan manusia Indonesia, dan tentunya dalam cara berkomunikasi.

Dalam bidang politik, teknologi menjadi suatu hal yang dipercaya dapat membantu dalam membangun relasi dan juga instrumen wajar atau standar dalam berkomunikasi dengan berbagai pihak, dalam berbagai acara dan peristiwa. Politik Indonesia yang mengalami banyak perubahan dari sistem fundamentalnya hingga ke pernik-pernik detail yang beragam juga terimplikasi dengan perkembangan teknologi yang ada. *Public sphere* menurut banyak pengamat, teorisi (sebut saja Habermas, 1962/1989; Arendt, 1958; John Dewey 1923/1954 dalam McQuail, 2000/2002; juga dalam Barret, 1995) dan pelaku politik merupakan syarat penting (*necessary condition*) bagi terwujudnya demokrasi yang ideal, dan ini bisa kita serapi dan alami dari pemikiran-pemikiran yang ada, mulai dari Robert A. Dahl, Ebenstein dan Fogelman, Henry B. Mayo, Lipjhart hingga Amin Rais (lihat Fatah, 2000). Hingga akhirnya kita sekarang ini berusaha mengaplikasikannya dan melahirkan berbagai bentuk ruang publik dalam berbagai ruang dan waktu. Mulai dari ruang komunikasi publik di suatu organisasi formal dan informal, komunikasi di media massa (suratkabar, radio, televisi, dan internet) hingga dalam berbagai setting komunikasi harian kita dalam kelompok pertemanan. Ragam ruang publik yang hadir di tengah-tengah kita-pun dapat kita temukan beraneka variasi dan kaya akan pengembangan. Tema dan topik pembicaraannya pun bervariasi, dari mulai harga sembako yang tidak pernah turun namun terus menerus naik, harga TDL dan tarif lainnya yang sepertinya terpola naik juga, kecelakaan domestik dan lokal, film, olahraga serta hiburan lokal dan internasional, hingga perilaku elit politik dan pejabat Negara yang korup tiada henti-hentinya menjadi bahan pembicaraan di masyarakat dalam berbagai ruangnya. Dari topik-topik penting hingga hal-hal remeh-temeh politik dan panggung pertunjukan.

Adalah sangat menarik melihat perkembangan komunikasi yang terjadi dalam kehidupan kita, khususnya bila kita hubungkan dengan suatu aspek penting kehidupan bangsa ini seperti komunikasi publik dalam ruang publik (*public sphere*) berkaitan dengan tema dan topik-topik ekonomi rakyat (mikro) dan makro, politik elit dan politik tanah air tercinta, ataupun perkembangan yang sedang terjadi terkait kehidupan sosial, budaya, hukum dan pendidikan. Banyak pertanyaan berhubungan

dengan konsep utama dan penting yang bisa kita soroti dalam hal ini, seperti bagaimana pengaruh teknologi terhadap perkembangan *public sphere* di tanah air? Apa pengaruh teknologi terhadap kehidupan dan praktik politik, ekonomi, dan bidang-bidang yang ada di masyarakat kita?, bagaimana kondisi dan eksistensi *public sphere* dalam setiap bidang penting dalam kehidupan kita?, dan berbagai pertanyaan penting terkait lainnya dapat kita ajukan di sini. Dan dari berbagai pertanyaan penting tersebut dalam bahasan ini, penulis akan mempertanyakan dan mencari tahu tentang “*bagaimana eksistensi dan perkembangan public sphere yang ada terkait dengan sistem demokrasi yang berkembang secara global di tanah air hingga 2012 pertengahan ini? Bagaimana masa depan public sphere dan demokrasi Indonesia mendatang?*”. Melalui tulisan ini penulis akan berusaha mencari gambaran dan jawaban terkait dengan pertanyaan tersebut.

II. PEMBAHASAN

Dari pertanyaan penting yang diajukan dalam bahasan ini maka ada dua konsep utama yang penting untuk dibahas sebagai landasan pemahaman konseptual bahkan bila diperlukan akan memberikan suatu konseptualisasi baru sesuai dengan temuan faktual di lapangan, paling tidak yang ditemui oleh penulis dalam rentang pengamatan yang ada. Dua konsep utama tersebut adalah *public sphere* dan sistem demokrasi. Selain itu pembahasan tentang globalisasi dan teknologi yang menyebabkannya dirasa perlu juga dibahas sebagai konsep penting lainnya terkait dengan fokus bahasan kali ini.

II.1. *Public sphere*: Teori, Asumsi-asumsi dan Esensinya

Bila kita mencoba kembali ke akar sejarahnya, berusaha untuk memahami tentang kelahiran dan penggunaan istilah *public sphere* dalam tiap konteksnya, secara substansial kita bisa tertarik kepada suatu praktik politik di masa Yunani yang disinggung dalam beberapa sumber dan tulisan yang ada. Sebagai contoh apa yang dilakukan Boyd-Barret (1995: 230-234), ia mendapatkan karya Jürgen Habermas tahun 1962, karya Scannell dan Cardiff (1989), Nicholas Garnham (1986), dan Philip Elliot (1982) terkait bahasan *public sphere* dengan konsennya masing-masing. Dahlgren (dalam McQuail, 2002) memberikan nama-nama penting pembahas konsep ini, seperti Arendt, Dewey juga Habermas, yang sepertinya hingga sekarang paling sering diidentikkan dengan *public sphere*.

McQuail (2002), mengutip Peter Dahlgren menyatakan bahwa secara historis naratif terdapat berbagai nama yang konsen dengan pembahasan dan pengembangan konsep *public sphere*. Menurut Dahlgren “*dalam pemikiran politik modern sekarang ini gagasan tentang publik dalam hubungan dengan proses demokrasi telah memberikan formulasi ambisius dalam karya-karya penulis; diantara yang paling terkenal adalah Dewey (1923/1954), Arendt (1958), dan Habermas (1962/1989). Konsep ini, tidak berarti identik dengan tiga pengarang ini [saja], mereka bekerja atau berbicara tentang tradisi yang berbeda dan pendekatan yang beragam*”(McQuail, 2002: 195-200). Artinya bahwa berbicara tentang istilah *public sphere* ada berbagai sumber dan nama yang bisa kita temukan dengan tema sentralnya masing-masing, meskipun pada akhirnya kita akan dan bisa temukan bahwa *public sphere* sangat identik dengan istilah kehidupan demokrasi dalam arti luas.

Secara konseptual, Habermas meyakini bahwa baginya *public sphere* adalah “*An ideal forum within which newspapers and journals were read and discussed in face-*

to-face groups, whose discussions were framed with reference to and on behalf of broader social interests than merely the interests of those who were physically present, and which helped to transform the relationship between aristocracy and the business class (Boyd-Barret, 1995). Dari sini dapat kita pahami, bahwa Habermas konsen menghubungkan *public sphere* dengan bidang politik, khususnya fungsi media massa sebagai pendorong kehidupan demokrasi partisipatif, meskipun secara historis ia menghubungkan ruang publik dengan masalah politik dan juga menganggap sebagai suatu ruang yang digunakan untuk semacam lobi kepentingan politik-ekonomi demi kepentingan masyarakat, dalam *setting* warung atau kedai kopi (*a bourgeois 'public sphere'*) dimana para elit politik bertemu dengan para pemikir, seniman, dan tokoh masyarakat di luar istana. Dalam *setting* tersebutlah terjadi kemungkinan semacam *pressure* dan masukan (meskipun diistilahkan dengan wadah atau forum menyampaikan gagasan dan informasi) bagi pemegang kekuasaan politik dari kalangan tersebut untuk memperhatikan konsen-konsen dan kepentingan yang diajukan melalui obrolan warung kopi (*public sphere*). Ruang diskusi tersebut merupakan suatu wadah yang dianggap sebagai sesuatu yang membantu untuk melakukan suatu transformasi dalam masyarakat, dari suatu kondisi ke kondisi lainnya. Karena melalui ruang tersebutlah para pengambil kebijakan dapat "dipengaruhi" atau ditekankan untuk memutuskan atau konsen pada suatu hal. Atau sebaliknya mereka yang berdiskusi dalam ruang tersebut jauh dari lingkaran intervensi kekuatan negara dan pihak otoritas, meskipun sebenarnya mereka bertujuan melakukan tekanan pada pihak otoritas untuk memperhatikan permasalahan-permasalahan yang dianggap sebagai kepentingan publik.

Habermas mengkonseptualkan '*public sphere*' sebagai suatu kenyataan dari kehidupan sosial dimana terjadi pertukaran informasi dan pandangan terhadap pertanyaan-pertanyaan [terkait dan/atau tentang] permasalahan atau konsen umum (publik) dan kemudian opini publik bisa terbentuk melaluinya (dalam McQuail, 2002: 195-200). Dari dua penjelasan konseptual tersebut secara sederhana dapat kita pahami substansi dari *public sphere* adalah sebagai suatu ruang dimana keputusan-keputusan penting terkait publik dirumuskan, dimana dalam ruang tersebut terjadi diskusi informasi dan pendapat tentang kepentingan-kepentingan publik (*public interests*), antara pengambil kebijakan (otoritas berkuasa: pemerintah) dengan para pelaku sosial seperti pengamat politik, pelaku politik, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh penting dalam bidang-bidangnya. Dalam ranah tersebutlah publik dapat berkumpul, berasosiasi dan menyatakan pandangan-logisnya. Singkatnya ruang inilah yang mencerminkan suatu perilaku partisipatif demokratis masyarakat, yang dapat bertatap muka, berinteraksi dan berdiskusi dengan siapa saja, terkait dengan kepentingan mereka, dengan keterlibatan logika mereka. Meskipun konseptualisasi ini bisa jadi secara naratif historis berbeda dengan akar sejarahnya, dimana dahulu ruang publik hanya merupakan suatu kedai kopi, yang hanya bisa dikunjungi oleh masyarakat kelas menengah atas dan para kerabat kerajaan sebagai cerminan dari pihak pemerintah (*otority*), namun secara esensial konseptualisasi ini masih dirasa satu garis pemikiran dan kandungan dengan apa yang disampaikan oleh Habermas sebagai satu dari beberapa pengembang gagasan penting ini.

II.2. Demokrasi: Tinjauan Konseptual, dari Sejarah hingga Konstitusi Nasional

Istilah ini bukan sesuatu yang asing lagi di telinga masyarakat kita, setiap hari bisa kita dengar istilah ini disebut dalam berbagai media massa nasional. Konsep ini



menurut berbagai sumber termasuk yang dipaparkan oleh Fatah (2000) tumbuh pertama kali dalam praktik negara-kota Yunani dan Athena (450 dan 350 SM). Menurutnya ada beberapa ciri yang memperlihatkan sistem ini berkembang saat itu, yaitu (1) Pemerintahan dilakukan oleh rakyat dengan partisipasi rakyat yang penuh dan langsung, (2) Kesamaan di depan hukum, (3) Pluralisme (penghargaan atas semua bakat, minat, keinginan dan pandangan), (4) Penghargaan terhadap suatu pemisahan dan wilayah pribadi. Empat ciri ini merupakan hal-hal yang melekat pada praktik pemerintahan atau kehidupan masyarakat Yunani dan Athena. Dimana pemerintahan atau pengelolaan Negara dilakukan oleh masyarakat dan melibatkan warganya dalam berbagai kegiatan. Mulai dari perencanaan suatu hal, pengambilan keputusan hingga pelaksanaan keputusan yang telah diambil secara bersama-sama. Kemudian ciri lainnya adalah kesamaan di depan hukum, bahwa dalam sistem demokrasi tidak ada perbedaan atau keistimewaan bagi siapapun, semua dilihat dan ditempatkan sejajar. Tidak ada pengecualian dan keistimewaan bagi siapapun, dari kelompok manapun, ataupun dari kelas manapun. Selanjutnya adalah pluralisme yang merupakan esensi dari demokrasi itu sendiri. Bahwa segala hal perbedaan, baik itu bakat, minat, keinginan ataupun pandangan merupakan sesuatu yang wajar dan dihargai dalam sistem ini, hingga akhirnya terdapat suatu pemisahan antara wilayah publik dengan wilayah pribadi.

Terkait penjelasan konsep demokrasi, Fatah dalam penjelasannya mengutip berbagai pendapat dan pandangan. Seperti Robert A Dahl yang menyatakan bahwa sistem demokrasi menganut asas (1) Persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat, (2) Partisipasi efektif (kesempatan yg sama bagi semua warga negara dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif), (3) Pembeberan kebenaran (adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis), (4) Kontrol terakhir terhadap agenda (adanya kekuasaan eksklusif bagi masyarakat untuk menentukan agenda mana yang harus dan tidak harus diputuskan) melalui proses pemerintahan, termasuk mendelegasikan kekuasaan tersebut pada orang lain atau lembaga wakil rakyat. Yang terakhir adalah (5) pencakupan (terliputnya masyarakat, semua orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum).

Sedangkan menurut Carter: Demokrasi diartikan sebagai "membatasi kekuasaan". Ebenstein dan Fogelman berpendapat bahwa demokrasi dianggap sebagai penghargaan atas sejumlah kebebasan yang dirinci dalam konsep-konsep: (1) empirisme rasional, (2) pementingan individu, (3) teori instrumental tentang negara, (4) prinsip kesukarelaan, (5) hukum di balik hukum, (6) penekanan pada soal cara, (7) musyawarah dan mufakat dalam hubungan antarmanusia, dan (8) persamaan asasi semua manusia.

Bagi Henry B. Mayo (dalam Fatah, 2000: 9) nilai-nilai yang mendefinisikan demokrasi diantaranya adalah menyelesaikan pertikaian secara damai dan sukarela. Artinya dalam keberagaman pendapat yang ada dari para pelaku politik atau masyarakat maka asas penyelesaian yang dikedepankan adalah penyelesaian yang bersifat damai dan menuntut rasa sukarela bagi para pelakunya untuk menerima segala keputusan yang diambil secara bersama-sama, meskipun harus mengorbankan sebagian keyakinan yang ada. Yang selanjutnya adalah demokrasi menjamin terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat, asumsi ini sejalan dengan asumsi sebelumnya. Selanjutnya bahwa pergantian kekuasaan dilakukan dengan

teratur. Artinya diperlukan suatu aturan dan tatanan pergantian penguasa atau pengelola Negara yang harus sejalan dengan asumsi-asumsi terdahulu. Yang keempat adalah demokrasi mendorong penggunaan paksaan sesedikit mungkin dalam pengelolaan Negara. Asumsi keempat ini menyadarkan kita bahwa dalam proses penyatuan keberagaman selain harus mengutamakan kedamaian dan kebersamaan juga berimplikasi pada adanya keterpaksaan, dan ini harus dilakukan seminimal mungkin agar rasa sukarela tidak tercederai. Lalu pengakuan dan penghormatan terhadap nilai keanekaragaman merupakan suatu hal yang memang hadir sejalan dengan lahirnya manusia yang beragam, oleh karena itu diperlukan suatu prinsip hukum yang menegakkan keadilan. Yang ketujuh, bahwa sistem demokrasi harus memajukan ilmu pengetahuan karena dengan hal inilah suatu tatanan terbentuk dan usaha penyempurnaan sistem akan dimungkinkan terjadi. Terakhir, pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan, yang merupakan hak asasi dari setiap pelakunya, dan merupakan bagian dari hak kolektif dalam arti kesatuan sebagai suatu bagian dalam sistem demokrasi. Artinya bagi Mayo tanpa nilai-nilai ini maka dapat dikatakan suatu sistem belumlah dikatakan benar demokratis meskipun dinamakan dengan sistem demokratis, seperti yang terjadi di Negara kita pada waktu-waktu lalu,¹ dan mungkin juga masih berlaku di beberapa praktik kehidupan bernegara kita.

Dari penjelasan para pemikir demokrasi yang ada paling tidak dapat kita ambil suatu kesimpulan besar bahwa dalam suatu sistem demokrasi haruslah tercermin atau benar terlihat partisipasi politik yang luas dan otonom, sirkulasi kepemimpinan secara efektif dan kompetitif, kontrol terhadap kekuasaan yang efektif, serta kompetisi politik yang leluasa dan sehat dalam suasana bebas. Bahkan Lijphart secara tegas menyimpulkan bahwa kehidupan demokrasi yang sebenarnya adalah merupakan perpaduan antara pengakuan dan penghargaan terhadap keanekaragaman (pluralitas) dengan terpeliharanya stabilitas politik dan pemerintahan (dalam Fatah, 2000).

Merujuk pada aturan dasar (landasan idiil) dan landasan konstitusional Indonesia sebenarnya Negara dan bangsa kita telah dilengkapi oleh perangkat yang cukup sejalan dengan teori demokrasi dan teori *public sphere* yang secara etimologi dan terminologi historis-nya berasal dari luar Indonesia, yang bahkan menurut penafsiran Arifin (2011: 88-91) berbeda dengan konsep “Kedaulatan Rakyat” yang diajukan Hatta, dari awal sejarahnya hingga implikasi konseptual yang ditimbulkannya. Namun harus kita akui bahwa ruh atau esensi yang terkandung di dalam dua istilah tersebut secara mendasar telah ada dalam darah Indonesia, yaitu pengakuan akan keberagaman dalam berbagai hal. Lihat saja sila ke-empat, bahwa musyawarah untuk mufakat yang merupakan satu dari butir sila ini memberikan penjelasan tentang sejalanannya dasar Negara kita dengan dua istilah tersebut (demokrasi dan *public sphere*), dan ini juga ada disebut dalam pembukaan UUD 1945, dalam alinea ke-empat yang menyebut Pancasila di dalamnya. Di pasal 28 juga terkandung kebebasan untuk menyampaikan gagasan dan mengekspresikan perasaan serta lainnya dengan tetap menghormati hak-hak orang lainnya. Dalam UUD 1945 amandemen ke empat semakin dipertegas aturan dalam berkespresi, berkumpul, berserikat dan menyampaikan pendapatnya (lihat UUD 1945, pasal 28 F).

¹ Di era Soekarno sistem Negara kita menamakan atau dinamakan dengan system demokrasi terpimpin, dan di zaman Soeharto kita kenal juga istilah demokrasi Pancasila, dimana pada praktiknya asas-asas demokrasi ditafsirkan secara tidak demokratis, karena teraplikasi perilaku otoriter dengan praktik monopoli penafsiran dan kebenaran oleh pihak penguasa dan mengabaikan atau bahkan mengebiri penafsiran dan pendapat lainnya yang berbeda dan bertentangan.

II. 3. Praktik *Public sphere* dan Demokrasi di Indonesia

Pada praktiknya, dapat kita lihat sekarang ini bahwa masyarakat bisa berdiskusi dalam arti luas dimana saja. Mulai di ruang-ruang formal yang memang dibentuk untuk diskusi hingga perkumpulan yang tidak disengaja terbentuk dalam kehidupan dan waktu sehari-hari mereka. Mulai dengan bentuk tatap muka langsung hingga bertukar pikiran melalui media teknologi yang hadir di tengah-tengah mereka.

Di media massa, seperti surat kabar, radio dan televisi para pelakunya mengalokasikan ruang mereka untuk publik, dimana publik bisa menyampaikan gagasan, informasi serta kritik mereka atas banyak hal, meskipun alokasi dan penamaannya pun antara surat kabar satu dengan lainnya berlainan. Melalui stasiun radio dan televisi, dialog interaktif ataupun talkshow tentang permasalahan-permasalahan publik diangkat sebagai bagian penting programnya. Mulai dari acara yang jelas mengidentikkan ruang publik untuk berdiskusi dan membicarakan permasalahan-permasalahan masyarakat yang sedang hangat, hingga suatu acara khusus yang sifatnya *incidental* dibuat sebagai suatu respons media dalam menyikapi keadaan yang berkembang, dengan menggunakan konsep ruang public yang dikomersialkan, jika kita mencoba menghubungkan praktik ini dengan apa yang Garnham paparkan dan dimodelkan oleh Golding dan Murdock dengan pendekatan ekonomi politiknya ketika berbicara tentang komunikasi massa (dalam Boyd-Barrett, 1995).

Munculnya teknologi internet jelas membawa perubahan signifikan pada aktivitas publik, termasuk dalam berekspresi dan mengembangkan ruang publik ataupun lainnya, baik terukur ataupun tak terukur namun dampaknya terasakan di masyarakat luas. Keniscayaan komunikasi lintas batas ruang (*spatial*), waktu dan geografis bukan lagi menjadi wacana intelektual semata, namun menjadi sesuatu yang hadir di masyarakat global. Prediksi McLuhan menjadi kenyataan dan redefinisi konsep-konsep komunikasi menjadi tidak sesederhana pada awal peletakkannya. Batasan antara komunikasi personal dan massal, yang pada tahap awal merupakan sesuatu yang mudah dibatasi dan sederhana untuk dijelaskan secara konseptual memerlukan pemikiran ulang dikarenakan batasan-batasannya menjadi samar dengan adanya teknologi lintas ruang, waktu dan geografis ini. ditambah dengan munculnya hp yang merupakan miniatur komputer yang digenggam oleh hampir setiap individu dalam masyarakat dunia. Ini mungkin sejalan dengan pendapat Kellner (1998) yang dikutip Dahlberg (2001 dalam <http://www.ascusc.org/> *Journal of Computer-Mediated Communication*), yang menyatakan bahwa hadirnya teknologi ini telah menghasilkan dan memperkaya ruang demokrasi bagi public untuk menyampaikan pikiran-pikiran kritis melalui berbagai macam bentuk, seperti *chatting-room*, *e-mail lists*, *blog*, atau lainnya yang berbasis kepada mediasi komputer berjaringan. Hadirnya teknologi hp berfitur internet jelas lebih mendorong fenomena ini dengan hadirnya semisal *bb-chat group* atau yang serupa ini. ruang publik kini hadir dimanapun, kapanpun dan dalam kondisi yang beragam dengan topik pembicaraan dari permasalahan-permasalahan serius masyarakat hingga ke anekdot dan sindiran-sindiran terhadap fenomena yang hadir di sekitar mereka.

Berdasarkan data statistic www.internetworldstats.com pengguna internet di Indonesia tahun 2010 mencapai 30 juta jiwa atau sekitar 12,3% dari total populasi Indonesia (lihat tabel Pengguna Internet di Indonesia). Data dari internetworldstats diatas bisa memberikan kita gambaran bagaimana kondisi penggunaan internet di masyarakat Indonesia yang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan,

meskipun ini tidak bisa dijadikan suatu sandaran akan perkembangan *public sphere* dan demokrasi yang berlangsung di tanah air. Tapi paling tidak data ini dapat kita tafsirkan sejalan dengan pendapat Kellner, Dahlberg dan lainnya yang sejalan bahwa potensi demokrasi menjadi lebih terdukung dengan hadirnya teknologi internet, karena masyarakat bisa menyampaikan dan bertukar gagasan, informasi dan pandangan-pandangan kritisnya melalui media ini. Bahkan dengan internet public dapat membuat dan mengarahkan suatu opini public yang signifikan dalam praktik-praktik politik, ekonomi dan lainnya. Hal ini bisa kita pertemukan dengan berbagai kejadian yang ada di tanah air. Berbagai kasus yang hadir di tahun belakangan ini, sebut saja kasus Manohara vs Pangeran Kelantan, Prita versus RS. OMNI International, KPK versus Polri (dalam kasus Cicak-Buaya) merupakan potongan-potongan kasus yang memberikan gambaran konkret bagaimana asumsi bahwa teknologi, khususnya internet, telah mengubah tatanan struktural sosial masyarakat, praktek dan konseptual *public sphere*, dan praktik demokrasi di tanah air.

Tabel Pengguna Internet di Indonesia

| Tahun | Pengguna | Populasi | % Pen. | GDP p.c.* | Usage Source |
|-------|------------|-------------|--------|------------|--------------|
| 2000 | 2,000,000 | 206,264,595 | 1,0% | US\$ 570 | ITU |
| 2007 | 20,000,000 | 224,481,720 | 8,9% | US\$ 1,916 | ITU |
| 2008 | 25,000,000 | 237,512,355 | 10,5% | US\$ 2,238 | APJII |
| 2009 | 30,000,000 | 240,271,522 | 12,5% | US\$ 2,239 | ITU |
| 2010 | 30,000,000 | 242,968,342 | 12,3% | US\$ 2,858 | ITU |

Sumber: <http://www.internetworldstats.com/asia/id.htm>

Note: Per Capita GDP in US dollars, source: United Nations Department of Economic and Social Affairs

Anggapan kritis yang terkandung dalam penjelasan Golding dan Murdock bahwa akhirnya *public sphere* melalui media massa akan sejalan dengan dua kepentingan politik dan ekonomi, dan praktik *public sphere* akan dikontrol oleh para elite (baik korporasi ataupun birokrasi), dengan hadirnya teknologi internet memiliki rival alternatif dalam pelaksanaan praktik demokrasi di Indonesia, yang kemungkinan juga bisa berlangsung di Negara manapun dengan situasi dan kondisi budaya, sosial, dan lainnya yang serupa dengan apa yang terjadi di Indonesia. Asumsi bahwa *public sphere* sebagai prasyarat utama dalam kehidupan demokrasi jelas dengan hadirnya teknologi internet menjadi sesuatu yang lebih niscaya dan logis, bukan hanya dalam tataran wacana tapi juga praktis. Dan ini terbukti dan terasa dalam kehidupan kita sehari-hari baik dalam lingkup birokrasi pemerintahan maupun korporasi yang melibatkan publiknya masing-masing.

Pertanyaan yang perlu dijawab selanjutnya adalah tentang mengukur kualitas *public sphere* yang ada dan signifikansinya dalam kehidupan demokrasi yang lebih baik ke arah yang ideal merupakan sesuatu yang tidak mudah untuk dijawab. Jawaban dirasa tidak cukup dengan hanya mengajukan kasus-kasus yang telah disebutkan (Manohara vs Pangeran Kelantan, Prita vs RS OMNI International atau yang semisalnya). Karena mengukur kualitas *public sphere* khususnya berkaitan dengan praktik demokrasi yang ada tidak hanya diperlukan jawaban-jawaban kualitatif semata, tapi perlu juga diukur dengan data-data kuantitatif, yang dapat dilakukan dengan survey secara meluas dengan berbagai hal yang terkait dengan praktik *public sphere* yang ada di

masyarakat. Mulai menghitung jumlah *public sphere* di media massa cetak (suratkabar, majalah, tabloid, dll), media massa radio, televisi, dan internet (yang meliputi jaringan sosial kelompok dan komunitas, ataupun lainnya).

Namun bila kita diminta untuk menjawab pertanyaan bagaimana kondisi *public sphere* di Indonesia? Dan bagaimana pengaruhnya terhadap praktik politik global di tanah air? Maka dapat kita jawab berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan bahwa konsep *public sphere* yang dikembangkan oleh para pemikir termasuk Habermas yang seringkali menjadi tokoh sentralnya, dapat kita lihat terjadi banyak pergeseran tampak muka (*forms representing terms*) yang secara esensial tetap mengarah kepada gagasan yang sama yaitu mengembangkan semacam pasar gagasan yang bebas dimana siapapun dapat melahirkan ranah ini dalam berbagai kesempatan, bentuk dan melalui berbagai cara, baik secara langsung ataupun bermedia. Perbedaan form ini tidak ada dalam penggambaran konsep *public sphere* awal yang mengharuskan interaksi temu muka antara para pelakunya.

Kemudian pelaku *public sphere* yang pada konsep historis awalnya hanyalah kaum aristocrat dengan pedagang dan kepentingan bisnis (*commerce*) serta terjadi di *coffee-house* yang dapat dikunjungi oleh mereka-mereka ini, kini terjadi pergeseran yang amat jauh. Ranah *public* kini hadir tidak saja di warung-warung atau kedai-kedai kopi tapi juga dalam media massa cetak dan elektronik, baik secara virtual ataupun nyata.

Lainnya yang merupakan catatan penting dari Habermas bahwa "*The public sphere cannot be seen as a space operating in isolation from all other social, political, economy domains, as if it were a self-contained entity, is one of Habermas' central points*", yang memberikan suatu perenungan penting dari bentuk-bentuk atau tampilan muka yang tertangkap oleh panca indera, meskipun *public sphere* bisa dilakukan dengan berbagai cara; dengan berbagai keterlibatan pelakunya yang beragam latarbelakang, pengetahuan, intelektual dan berbasis data terdokumentasi ataupun tidak berbasis data yang terdokumentasi; melekat pada suatu institusi formal ataupun tidak, bahwa semua yang hadir dalam realitas *public sphere* di masyarakat kita, khususnya dalam konteks kehidupan demokrasi maka dapat kita tangkap bahwa *public* memang merupakan suatu realitas nyata dan bukan abstrak yang hadir sebagai realitas kehidupan, ia tidak akan pernah bisa terlepas dari pengaruh kepentingan sosial, ekonomi dan politik baik makro ataupun mikro. Karena semua aspek tersebut hadir bersamaan dengan hadirnya manusia sebagai pengkonstruksi realitas *public sphere*.

Perkembangan *public sphere* dalam berbagai bentuk dan dalam berbagai level kehidupan masyarakat kita, mulai dari kehidupan keluarga, komunitas kelompok, korporasi dan profesi, hingga dalam tatanan kehidupan bernegara dirasa membawa dampak dan pengaruh yang sangat terasa. Kita lihat muncul berbagai tipologi keluarga yang menganut asas demokrasi. Dan inipun masuk ke dalam level komunitas kelompok, korporasi dan profesi dan yang paling nyata dan sering kali kita lihat dalam berbagai media massa sebagai bukti dokumentasinya adalah dalam tatanan dan perilaku bernegara, baik dalam internal Negara kita maupun dalam tatanan hubungan internasional.

III. KESIMPULAN

Dari semua ini dapat kita simpulkan bahwa terjadi pergeseran secara konseptual atas *public sphere*, khususnya berkaitan dengan historis naratif, bahwa *public sphere* meskipun masih dimaknai sebagai suatu ranah pasar bebas gagasan latarbelakang ekonomi, sosial dan politik yang ada dahulu dan sekarang jelas berbeda. Jika Habermas mengusungnya dan merefleksikannya dalam konteks historis tatanan ekonomi liberal di Eropa, hanya dilakukan oleh para elit aristocrat dan kelas bisnis, berbasis kepada data jurnal dan surat kabar dalam diskusinya, dan dilakukan di kedai kopi kini *public sphere* dapat terjadi dalam berbagai saluran dilakukan oleh siapapun tidak menjadi syarat adanya data dari jurnal dan surat kabar karena topik atau data bisa berasal dari tangkapan dan pengalaman harian para pelakunya, serta tidak lagi ada batasan kelas yang signifikan.

Namun jika kita mencoba menghadapkannya dengan konteks ekonomi politik yang ada, perkembangan *public sphere* benar didorong oleh teknologi yang menerabas batas-batas ruang, waktu dan batasan-batasan lainnya, tetapi konstelasi politik dan pergerakan system internal politik sepertinya menjadi suatu kondisi penting (*necessary condition*) dalam terwujudnya *public sphere* yang mendukung kehidupan demokrasi di masyarakat. Ini terbukti dengan perjalanan sejarah kita di masa dan era orde baru (1966 – 1997) dimana komputer sudah ada dan berkembang, termasuk internet, selain itu televisi dan media massa juga sudah beroperasi, namun kondisi *public sphere* belum berkembang seperti sekarang ini. dan jelas kita temui praktik kehidupan yang demokratis terbelenggu oleh kekuatan politik yang berkuasa saat itu. Dengan kata lain kondisi ini menguatkan pendapat Habermas bahwa *public sphere* selalu tidak akan bisa lepas dari factor ekonomi, politik, sosial dan budaya yang ada, dan hal ini juga memperkuat asumsi bahwa kebebasan dan perkembangan *public sphere* merupakan prasyarat yang tidak bisa ditawar-tawar jika ingin menghasilkan kehidupan demokrasi yang berkualitas. Dengan kata lain kualitas *public sphere* akan sejalan dengan kualitas praktik demokrasi. Bila baik kualitas *public sphere* yang ada dan berlaku dalam masyarakat maka praktik demokrasi yang berlaku dalam masyarakat akan baik kualitasnya. Karena *public sphere* dapat juga dijadikan sebagai satu dari parameter kehidupan demokrasi yang sebenarnya berlaku dalam suatu tatanan [TM@MN].

REFERENSI

Buku

- Arifin, Anwar., (2011). *Sistem Komunikasi Indonesia*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Connaughton, Stacey L., dan Daly, John A., (2005). "Leadership in the New Millenium: Communicating Beyond Temporal, Spatial, and Geographical Boundaries", dalam *Communication Yearbook 29*. Pamela J. Kalbfleisch (ed.). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Association.
- Dahlberg, Lincoln., (2001). "Computer-Mediated Communication and The Public Sphere: A Critical Analysis", dalam *Journal of Computer-Mediated Communication*, <http://www.ascusc.org/>
- Em Griffin. (2003). *A First Look at Communication Theory*. 5th (eds.) (McGraw-Hill)

- Fatah, Eep Saefullah (2000). *Pengkhianatan Demokrasi ala Orde Baru: Masalah & Masa Depan Demokrasi Terpimpin Konstitusional*. Edisi Revisi. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya)
- Habermas, Jürgen., [translated by Thomas Burger]., (1993). *The Structural Transformation of the Public sphere*. (Massachusetts – Cambridge: The MIT Press)
- McQuail, Denis., (2000), *McQuail's Mass Communication Theory*. 4th (Ed). (London: Sage Publications)
- McQuail, Denis., [ed]., (2002). *McQuail's Reader in Mass Communication Theory*. Dalam "The Public Sphere as Historical Narrative" oleh Peter Dahlgren. (London: Sage Publications)
- Nurudin. (2007). *Pengantar Komunikasi Massa*. (Jakarta: Grafindo)
- Oliver Boyd-Barrett & Chris Newbold [ed]., (1995). *Approaches to Media Reader*. (London: Arnold)
- Straubhar, Joseph., & La Rose, Robert., (2002). *Media Now: Understanding Media, Culture and Technology*. (Canada: Wadsworth)
- Vivian, John., (2008). *Teori Komunikasi Massa*, edisi ke-8. (Jakarta: Kencana)

Website

www.internetworldstats.com atau <http://www.internetworldstats.com/asia/id.htm>

<http://www.antarane.ws.com/berita/1279093421/pengguna-ponsel-indonesia>

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Nasucha/My%20Documents/Kajian%20Pengguna%20Handphone%20di%20DKI%20Jakarta%20_%20Statistik%20Susenas.htm

